

**PENGELOLAAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MELALUI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA**

Sakum¹; *Ismamudi²

Universitas Pelita Bangsa

mr.sakum@yahoo.co.id; isma.mudi@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Dalam dua tahun terakhir, ketahanan ekonomi nasional diuji oleh guncangan krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang mulai merebak di Indonesia sejak awal tahun 2020. Pemerintah memberikan respon cepat untuk memulihkan perekonomian nasional melalui berbagai bauran kebijakan. Namun, Ketidakpastian dan Tantangan Global menjadi perhatian bagi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam merumuskan strategi Pemulihan Ekonomi Nasional yang efektif dan efisien, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Sehingga menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Harga dilakukan melalui Pelonggaran mobilitas masyarakat sejalan dengan pengendalian Covid-19, Kebijakan Fiskal sebagai Peredam Guncangan, Stabilisasi Harga, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Program Kartu Prakerja, Mendorong Pengembangan UMKM: UMKM Naik Kelas, dan Melanjutkan Reformasi Struktural.

Kata kunci: Manajemen, Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Abstract

In the last two years, the resilience of the national economy was tested by shocks from the unprecedented global crisis of the COVID-19 pandemic which began to spread in Indonesia since early 2020. The government gave a quick response to restore the national economy through various policy mixes. However, Global Uncertainty and Challenges have become a concern for government policies in making decisions in formulating an effective and efficient National Economic Recovery strategy, especially The Coordinating Ministry For The Economy Of The Republic of Indonesia. So it is interesting to study in this research. The research method uses descriptive qualitative. The results of the study show that Government Policy in Economic Recovery and Maintaining Price Stability is carried out through The relaxation of community mobility is in line with the Covid-19 control, Fiscal Policy as a Shock Absorber, Price Stabilization, Improving the Quality of Human Resources through Pre-Employment Card Program, Encouraging MSME Development: MSMEs Upgrading, and Continuing Structural Reform.

Keywords: Management, National Economic Recovery, Ministry For The Economy Of The Republic of Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam dua tahun terakhir, ketahanan ekonomi nasional diuji oleh guncangan krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang mulai merebak di Indonesia sejak awal tahun 2020. Pemerintah memberikan respon cepat untuk memulihkan perekonomian nasional melalui berbagai bauran kebijakan.

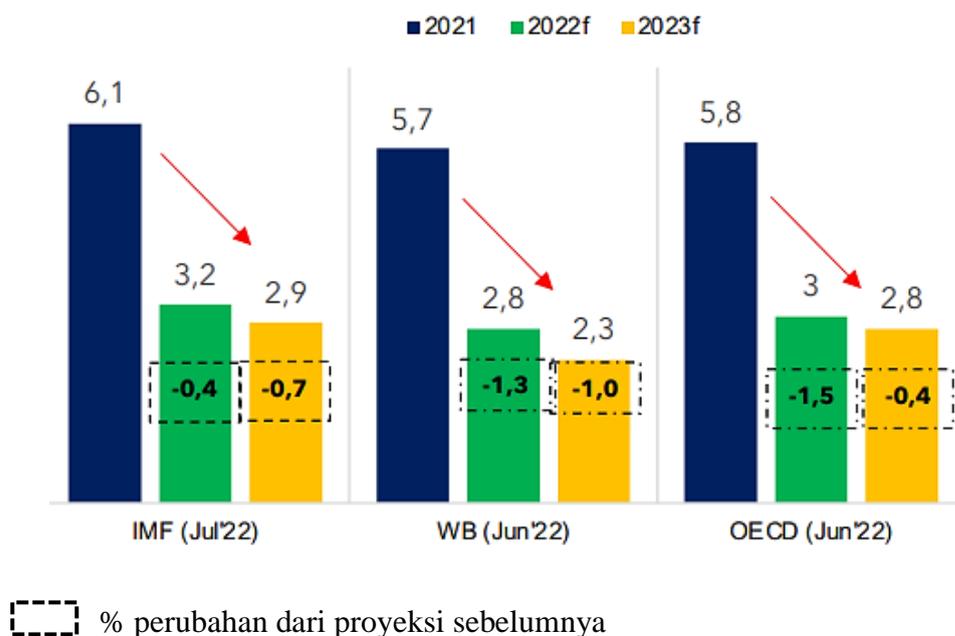
Kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dicanangkan pemerintah

sebagai upaya menghadapi resesi akibat Covid-19 telah memberikan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi. PEN telah berhasil membawa Indonesia secara perlahan keluar dari resesi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan perbaikan sejak terjadinya pandemi, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 masih rendah seperti yang diprediksi oleh hampir semua lembaga.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 yang berkontraksi minus 2,07%, dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2020 sebesar minus 2,19% (yoy). Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan beberapa negara di dunia seperti Singapura (minus 5,8%), Filipina (minus 9,5%), Amerika Serikat (minus 3,5%), dan Uni Eropa (minus 6,4%).

BPS mencatat, penurunan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan masih lemahnya konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2020 yang hanya tumbuh minus 2,63%. Hingga kuartal IV-2020, penjualan eceran masih berkontraksi 17,39%. Padahal, jika dibandingkan dengan kuartal IV-2019, penjualan eceran berhasil tumbuh 1,39%. Kontraksi penjualan eceran pada tahun 2020 terjadi pada penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok sandang, suku cadang dan aksesoris, kelompok bahan bakar kendaraan, kelompok peralatan informasi dan telekomunikasi, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok barang lainnya. Komponen penjualan wholesale mobil penumpang dan sepeda motor juga masih mengalami kontraksi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih sangat rendah, sehingga menjadi kewajiban kita untuk memperkuat permintaan.

Dalam perkembangan tahun 2022, kombinasi berbagai ketidakpastian memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia dan meningkatkan kekhawatiran akan risiko resesi. IMF pada bulan Juli 2022 memangkas proyeksi ekonomi global dari 3,6% menjadi 3,2% pada tahun 2022, termasuk AS dan China. Proyeksi inflasi global direvisi naik karena kenaikan harga pangan dan energi serta ketidakseimbangan penawaran-permintaan. Isu stagflasi dan bahkan resesi menjadi perhatian para pembuat kebijakan di seluruh dunia.



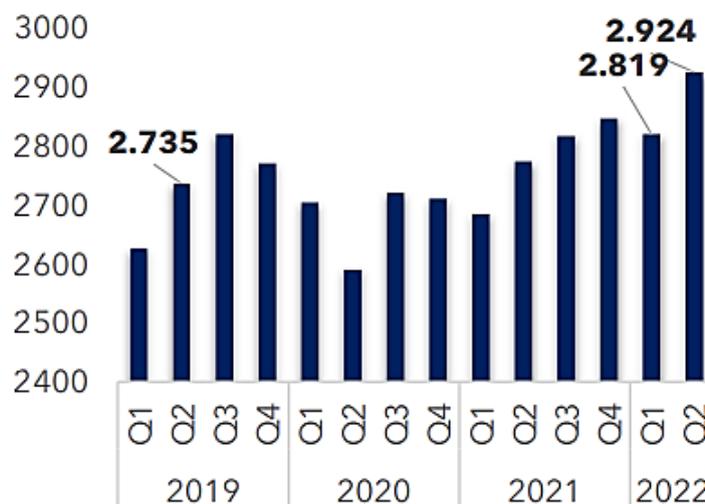
Gambar 1. Proyeksi Ekonomi Global 2022-2023 (%)

Sumber: WEO IMF Juli 2022

Di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,44% (yoy) pada Triwulan II-2022, dibandingkan dengan Triwulan I-2022 yang tumbuh 5,01% (yoy). Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh solid (5,51%) ditopang oleh kinerja ekspor yang cukup baik (19,74%). Dari sisi sektoral, Transportasi, Pergudangan, dengan pertumbuhan tertinggi (21,27%) dan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (9,76%), seiring pulihnya mobilitas masyarakat akibat penanganan pandemi yang baik dan terkendali.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia per triwulan (%yoy)



Gambar 3. PDB Konstan 2010 (Triliun Rupiah)
Sumber : BPS, 2022

Namun Ketidakpastian dan Tantangan Global telah menjadi perhatian bagi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam merumuskan strategi Pemulihan Ekonomi Nasional yang efektif dan efisien, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Sehingga menarik untuk dikaji dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta-fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu pengetahuan atau teori. Paradigma penelitian menjelaskan bagaimana peneliti memahami

masalah, kriteria pengujian sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian (Guba & Lincoln, 1988).

Penelitian kualitatif terdiri dari metodologi umum, yang berisi banyak metode penelitian yang berbeda. Umumnya melibatkan analisis sistematis data tekstual yang diperoleh berdasarkan wawancara, survei, kelompok fokus, dan catatan harian. Melalui pendekatan ini, dapat berguna untuk mendapatkan informasi budaya yang terperinci tentang nilai-nilai, minat, perilaku, pendapat kelompok-kelompok dalam masyarakat (Smith & Smith, 2018). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang ada secara menyeluruh yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah melalui penjelasan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). (Moleong, 2007).. Metode perolehan data untuk penelitian ini adalah observasi langsung maupun tidak langsung. Peneliti berusaha menemukan dan mengungkapkan data lapangan secara alamiah lingkungan. Oleh karena itu, peneliti perlu berhati-hati dan bijaksana dalam menerapkan teknik pemerolehan data di lapangan untuk pengadaan data secara individual agar dapat memperoleh data yang benar-benar alamiah. Setiap proses yang dilakukan oleh seorang peneliti diketahui oleh semua orang yang pernah diteliti. Namun pada masa lalu, peneliti tidak melakukan observasi secara terang-terangan atau diam-diam untuk menghindari hal tersebut jika data yang dicari masih bersifat rahasia. Jika sudah seperti itu, maka Peneliti tidak diperbolehkan melakukan observasi. Ekstrapolasi adalah cara penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bersama-sama selama proses induksi analitik dan dilakukan secara bertahap dari kasus ke kasus yang lain, kemudian dari proses analisis tersebut dirumuskan suatu pernyataan teoritis (Mundir, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (public policy is whatever the government choose to do something or not doing something). Jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu saja memiliki maksud dan tujuan, karena kebijakan publik adalah tindakan pemerintah. Jika pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, maka hal ini termasuk kebijakan publik yang memiliki tujuan (Dye, 2005).

Pelonggaran mobilitas masyarakat sejalan dengan pengendalian Covid-19

Untuk mendukung kelanjutan mobilisasi, pelaksanaan vaksinasi ketiga (booster) secara nasional masih terus berlanjut dan Pemerintah terus mengupayakan percepatan distribusi vaksin ke seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah juga melakukan percepatan vaksinasi booster untuk kelompok lanjut usia (lansia) dan remaja. Pelonggaran tingkat PPKM dan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat diharapkan dapat meningkatkan konsumsi. Selain mendorong konsumsi, peningkatan mobilitas masyarakat juga akan mendorong terbukanya sektor-sektor ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan mendorong pendapatan masyarakat di tahun 2022. Selain itu, implementasi berbagai kebijakan pemerintah, baik terkait pembatasan maupun pelonggaran mobilitas masyarakat perlu terus dievaluasi agar dapat memberikan dampak yang signifikan baik secara maksimal untuk memitigasi penyebaran COVID-19 maupun untuk mendorong aktivitas ekonomi. (Juliana & Prakoso, n.d.).

Pengelolaan Kebijakan Fiskal sebagai Shock Absorber

Mekanisme ini biasanya menetapkan bahwa persentase tertentu dari setiap kenaikan atau penurunan ekonomi harus diimbangi dengan pembayaran ke dana pusat (Dullien & Fichtner, 2013; Enderlein et al., 2013). Dengan peredam guncangan (parsial) yang mengimbangi persentase tertentu dari guncangan (Enderlein et al., 2013)dampak

kesejahteraan dari semua guncangan menjadi lebih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh garis merah. Sebuah alternatif dari peredam kejut adalah dengan memperkenalkan deductible, tetapi dengan kompensasi penuh untuk semua guncangan di atas ambang batas tersebut. Hilangnya kesejahteraan sebagai fungsi dari guncangan ditunjukkan oleh garis hijau (di mana ambang batas ditetapkan sebesar 1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mencapai tujuan nasional yang dalam perjalanannya mencapai tujuan tersebut terkadang harus menghadapi jalan yang tidak selalu mulus. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional, APBN setidaknya memiliki 6 (enam) fungsi, yaitu 1) fungsi otorisasi, 2) fungsi perencanaan, 3) fungsi pengawasan, 4) fungsi alokasi, 5) fungsi distribusi, dan 6) fungsi stabilisasi. Fungsi APBN sebagai instrumen stabilisasi mengandung makna bahwa anggaran pemerintah merupakan alat untuk menjaga dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Dalam menghadapi berbagai peristiwa yang berdampak serius terhadap perekonomian nasional, APBN berperan sebagai shock absorber, yaitu instrumen yang sangat penting untuk memberikan dukungan bagi penanganan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya berakhir, dunia kembali diguncang oleh perang Rusia-Ukraina. Dampak perang tersebut terhadap Indonesia antara lain: penurunan nilai tukar rupiah, penurunan pasar modal dalam negeri, hilangnya pendapatan akibat penurunan ekspor, dampak kenaikan harga minyak yang turut mempengaruhi APBN, dan kenaikan impor komoditas gandum (Ukraina merupakan importir utama gandum Indonesia). Situasi ini menuntut APBN untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber dalam menjaga keseimbangan perekonomian domestik dan melindungi masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam menjalankan perannya sebagai instrumen dalam mencapai tujuan nasional, APBN juga memiliki keterbatasan sehingga APBN perlu dijaga baik sebagai peredam kejut yang efektif maupun keberlangsungan dan kesehatannya. APBN perlu dijaga pada tiga tujuan yang seimbang, yaitu menjaga daya beli masyarakat, pemulihan ekonomi dan APBN agar tetap sehat. Kebijakan fiskal yang kuat akan menjadi jangkar stabilitas makro yang merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan suatu perekonomian. Oleh karena itu, APBN perlu dijaga melalui langkah-langkah reformasi fiskal untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitasnya.

Stabilisasi Harga

Dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional, kebijakan yang diambil pemerintah adalah sebagai berikut:

Pertama, memperkuat identifikasi sumber-sumber tekanan inflasi di daerah melalui penggunaan data makro dan mikro serta data yang lebih detail.

Kedua, memperluas kerja sama antardaerah untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga antardaerah. Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah perlu mengidentifikasi daerah-daerah yang surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi;

Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antar daerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat;

Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah;

Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja dinilai mampu mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM), selain meningkatkan daya beli di masa pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari tahun pertama pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada 2020 yang mencapai 5,5 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp20 triliun. Sementara itu, pada kuartal I 2021, manfaat Program Kartu Prakerja juga telah dirasakan oleh 2,77 juta peserta baru. Total penerima Kartu Prakerja angkatan 1-40 telah mencapai 413,9 juta penerima

Mendorong Pengembangan UMKM: Peningkatan UMKM

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan talenta digital dan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai program dilakukan agar UMKM dapat mengikuti perkembangan proses digitalisasi dan dapat segera naik kelas. Program yang difasilitasi oleh Pemerintah antara lain Kartu Prakerja, Gerakan Literasi Digital Nasional yang menysasar masyarakat umum, Digital Talent Scholarship yang menysasar level teknis dan profesional, serta Digital Leadership Academy yang menysasar praktisi level pimpinan (sektor publik dan swasta). Ekonomi Digital Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi di ASEAN dengan nilai US\$70 miliar atau menguasai 40% pangsa Ekonomi Digital ASEAN. Nilai ini diperkirakan akan terus tumbuh hingga tahun 2025 hingga mencapai US\$146 miliar. Salah satu sektor yang sedang berkembang yang menunjukkan lanskap ekonomi digital Indonesia adalah teknologi pendidikan (edutech) yang saat ini memiliki pertumbuhan pengguna aktif yang cukup signifikan dan mencapai 200% di tahun 2020. Peningkatan pengguna juga terjadi di sektor teknologi kesehatan (healthtech). Selain itu, ada juga gelombang teknologi baru, seperti jaringan 5G, Internet of Things, blockchain, kecerdasan buatan, dan komputasi awan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Indonesia saat ini memiliki UMKM yang mencapai sekitar 64,2 juta usaha, sehingga mampu menyumbang 60,51 persen dari PDB atau senilai Rp 9.580 triliun. UMKM juga berkontribusi dalam penyerapan 97% dari total tenaga kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. Dalam praktiknya, UMKM di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan, seperti dalam hal inovasi dan teknologi yang perlu ditingkatkan, pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), branding dan pemasaran, legalitas, serta standarisasi dan sertifikasi (Pramono et al., 2022).. Di masa pandemi ini, tantangan UMKM semakin meningkat dalam hal adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi UMKM melalui penerapan teknologi digital. UMKM di era digital diharapkan mampu menjadi Super Smart Society, yaitu menyeimbangkan pelayanan melalui teknologi yang mampu mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik. Hal ini diperlukan mengingat disrupsi digital belum mencapai puncaknya dan masih akan terus terjadi. Saat ini, terjadi gelombang disrupsi kedua yang mendukung bisnis digital seperti Agri-tech dan Food-tech (pertanian digital vs pertanian lokal); Health technology (konsultasi digital); Edu-tech (e-Learning); Interactive Games and Experiences (media hiburan digital, pengumpulan data); Digital Banking dan Fintech (peer to peer lending, equity crowdfunding). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berpihak pada UMKM, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi. Pada tahun 2020, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Dukungan UMKM direalisasikan sebesar Rp121,20 triliun dan pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp95,13 triliun. Meningkatkan Target Penyaluran KUR tahun 2022 menjadi Rp373,17 T. Realisasi KUR Jan-31 Juli 2022 sebesar Rp209,1 T (56,02% dari target) dan diberikan kepada 4,4 juta debitur.

Melanjutkan Reformasi Struktural

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial masyarakat, seiring dengan target keluar dari jebakan kelas menengah dalam jangka menengah-panjang. Untuk meningkatkan jumlah investasi, Pemerintah telah memperluas ranah investasi untuk memperluas penciptaan lapangan kerja baru (Saputro & Duha, 2022). Terdapat 246 bidang usaha prioritas yang akan dibuka untuk investasi dengan fasilitasi insentif fiskal dan non-fiskal. Industri yang berorientasi ekspor dan berteknologi tinggi diprioritaskan agar dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Indonesia telah berhasil meraih beberapa komitmen investasi dari luar negeri. Sebagai contoh, kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menghasilkan komitmen bisnis dan investasi sebesar US\$44,6 miliar. Selain itu, investasi sebesar US\$9,29 miliar yang berhasil diperoleh Indonesia dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 tahun lalu untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Pemerintah juga telah merilis Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum untuk menerapkan mekanisme penilaian ekonomi gas rumah kaca. Selain itu, Pemerintah akan menerapkan pajak karbon untuk mengubah perilaku pelaku ekonomi agar melakukan kegiatan rendah karbon. Pada tahun ini, Indonesia juga dipercaya menjadi Presidensi G20. Setidaknya ada tiga keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dari kepemimpinan ini, baik dari sisi ekonomi, pembangunan sosial, dan politik (Duha & Saputro, 2022). Dari aspek ekonomi, salah satunya ditargetkan untuk meningkatkan konsumsi domestik.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Harga dilakukan melalui Pelonggaran mobilitas masyarakat sejalan dengan pengendalian Covid-19. Pemerintah juga melakukan percepatan vaksinasi booster bagi lanjut usia (lansia) dan remaja. Pelonggaran tingkat PPKM dan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat diharapkan dapat meningkatkan konsumsi. Selain mendorong konsumsi, peningkatan mobilitas masyarakat juga akan mendorong terbukanya sektor-sektor ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan mendorong pendapatan masyarakat di tahun 2022.

Kebijakan Fiskal sebagai Peredam Guncangan, Dalam menghadapi berbagai peristiwa yang berdampak serius terhadap perekonomian nasional, APBN berperan sebagai peredam guncangan (shock absorber), yaitu instrumen yang sangat penting untuk memberikan dukungan bagi penanganan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.

Stabilisasi Harga. Dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Improving the Quality of Human Resources through Pre-Employment Card Program, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Program Kartu Prakerja, Mendorong Pengembangan UMKM: Peningkatan UMKM. Melanjutkan Reformasi Struktural. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan talenta digital dan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai program dilakukan agar UMKM dapat mengikuti perkembangan proses digitalisasi dan dapat segera naik kelas. Program yang difasilitasi oleh Pemerintah antara lain Kartu Prakerja, Gerakan Literasi Digital Nasional yang menasar masyarakat umum, Digital Talent Scholarship yang menasar level teknis dan profesional, serta Digital Leadership Academy yang menasar praktisi level pimpinan (sektor publik dan swasta).

Reformasi struktural merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi yang

berkelanjutan, untuk meningkatkan jumlah investasi, Pemerintah telah memperluas bidang usaha yang dapat membuka lapangan kerja baru. Terdapat 246 bidang usaha prioritas yang akan dibuka untuk investasi dengan fasilitasi insentif fiskal dan non-fiskal. Industri yang berorientasi ekspor dan berteknologi tinggi diprioritaskan agar dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Duha, J., & Saputro, G. E. (2022). Blue Economy Indonesia to Increase National Income through the Indian Ocean Rim Association (IORA) in the Order to Empower the World Maritime Axis and Strengthen State Defense. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 7(2), 514–527.
- Dullien, S., & Fichtner, F. (2013). A common unemployment insurance system for the euro area. *DIW Economic Bulletin*, 3(1), 9–14.
- Dye, R. T. (2005). *Understanding Public Policy, by Person Education. Inc, Upper Saddle River, New Jersey, USA.*
- Enderlein, H., Guttenberg, L., & Spiess, J. (2013). *Making One Size Fit All: Designing a Cyclical Adjustment Insurance Fund for the Eurozone. Policy Paper No. 61, Notre Europe.*
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1988). Do inquiry paradigms imply inquiry methodologies. *Qualitative Approaches to Evaluation in Education*, 1(1), 89–115.
- Juliana, G. E. S., & Prakoso, L. Y. (n.d.). *Implementation of Defense Industry Policy in Supporting National Economic Growth.*
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mundir, M. (2013). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. STAIN Jember Press.
- Pramono, B., Prakoso, L. Y., Alman, G. C., Rianto, R., Sutrasna, Y., Sulistyadi, E., Murtiana, S., Haetami, H., Uksan, A., & Almubaroq, H. Z. (2022). KEBIJAKAN EKONOMI DIGITAL DIANTARA PELUANG DAN ANCAMAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 385–394.
- Saputro, G. E., & Duha, J. (2022). The Political Economy of Fulfilling the Minimum Essential Force: Contextual investigations of Idea Improvement in the Guard Business. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1).
- Smith, R., & Smith, L. (2018). Qualitative methods. In *Research methods in human rights* (pp. 70–93). Routledge.